

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah capaian opini wajar pengecualian (WTP) yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Meski demikian, masih terdapat 23 pemda yang sampai saat ini belum pernah meraih opini WTP sejak pertama kali diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat 23 pemda yang sampai dengan semester I 2022 belum pernah memperoleh opini WTP. Sebanyak 23 pemda tersebut terdiri atas 22 pemkab dan satu pemerintah kota yang tersebar di tujuh provinsi. Sebanyak 13 pemda di antaranya belum pernah memperoleh opini WTP selama lebih dari 15 tahun (15 LKPD). Dua dari 23 pemda tersebut, yaitu Pemkab Waropen dan Pemkab Mamberamo Raya. LKPD kedua pemkab tersebut selalu memperoleh opini TMP (Yuliantri, 2023). Selain itu, berdasarkan audit BPK atas LKPD Tahun 2021 terdapat 26 Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP dan 2 Pemda meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta masih terdapat beberapa temuan audit yang perlu ditindaklanjuti (Kemenkeu, 2022).

Laporan keuangan harus dilaporkan secara terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi karena laporan keuangan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan tata kelola yang baik dan

memenuhi misi masyarakat (Wardana, *et al.*, 2022). LKPD kemudian diperiksa oleh BPK (Safitri & Dezar, 2021). Ketika BPK memberikan WTP terhadap LKPD, maka dapat dikatakan laporan keuangan suatu entitas diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan BPK atas LKPD, yaitu : WTP, WDP, Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Yuliani & Agustini, 2016). Kasus akuntansi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di Indonesia, dan penelitian ini menyelidiki faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan. Tujuan umum penerbitan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai anggaran fiskal, kinerja, dan arus kas (Irwandi & Pamungkas, 2020).

Hasil pemeriksaan tahun anggaran 2012-2022 Pemda DIY kembali meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD DIY tahun 2021 oleh BPK RI. WTP selama 12 kali berturut-turut (2012-2023) yang dicapai Pemda DIY dikarenakan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah baik secara akuntabilitas dan juga efektivitas pengendalian internal telah terpenuhi (BPK, 2022).

Meskipun telah memperoleh WTP, BPK RI menemukan beberapa masalah salah satunya yaitu pengelolaan piutang pajak, retribusi dan piutang lain-lain, belum memadai, pengelolaan atas BMD belum tertib, dan pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan (DINKES, 2022). Oleh karena itu, Pemda DIY perlu memperhatikan beberapa hal yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), efektivitas pengendalian sistem internal, kejelasan dan pengungkapan detail informasi laporan keuangan, dan kesesuaian pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturann perundang-undangan. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas laporan Pemda DIY (Herawati, 2022).

Pada tahun 2014, BPK mencatat hasil evaluasi terhadap 519 LKPD, terdapat 6034 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern (Kusuma, *et al.*, 2016). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan BPK. Oleh karena itu, penelitian mengenai laporan keuangan merupakan topik yang menarik untuk dikaji (Safitri & Dezar, 2021).

Berkaitan dengan masalah laporan keuangan yang harus dirumuskan berdasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kebenaran dalam konsep Islam adalah sesuatu yang berdasarkan sunatulloh sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Mukminun ayat 71 yang berbunyi:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بَلْ أَنْتَبَهُمُ بَدْرُهُمْ فَهَمُّ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۗ

Artinya: “Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, maka pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”.

Pengelolaan keuangan daerah akan lebih akuntabel dan berkualitas apabila dalam penyajiannya mengikuti SAP sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Adapun komponen laporan keuangan meliputi: Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Safitri & Zulkarnain, 2021). Berdasarkan SAP daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan SAP (Ariyanto, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam satu periode (Setyowati, *et al.*, 2016). Selain itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah yang harus memenuhi prinsip-prinsip dan disusun dengan mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Yuliani & Agustini, 2016).

International Accounting Standards Board (IASB) menyatakan tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Muzira, 2019). Agar laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakainya, maka diperlukan karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang terdiri dari: dapat dipahami, relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan (Standar Akuntansi Keuangan, 1999). Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (IAI, 2023). Selain itu, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan seperti relevan, keandalan, komparatif, dan dimengerti.

Kualitas pelaporan berkaitan dengan informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi akan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Artinya memiliki informasi yang relevan dan akurat. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan, semakin tinggi pula manfaat yang bisa diperoleh pengguna laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan mewakili laporan keuangan yang menyediakan informasi akurat, adil mengenai posisi keuangan yang mendasari kinerja ekonomi suatu entitas IASB (2008).

Menurut Helden (2019) kebijaksanaan umum tentang pengguna dokumen akuntansi sektor publik diartikulasikan sebagai berikut: “Untuk menghasilkan laporan keuangan yang disesuaikan dengan masing-masing pemangku kepentingan tidak akan ekonomis atau bahkan mungkin. Legislatur dan pembuat standar memiliki tugas memastikan tingkat minimum dan menyeimbangkan berbagai kepentingan pemangku

kepentingan. Dengan demikian, pelaporan keuangan harus memenuhi kebutuhan informasi umum dan umum dari pengguna eksternal potensial yang tidak dapat meminta laporan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik mereka.” Kerangka konseptual 2018 dengan jelas menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas.

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi (Safitri & Dezar, 2021). Kemampuan akuntansi adalah kemampuan entitas untuk menggunakan sistem akuntansi secara efektif untuk mewujudkan harapan entitas (Jantarajaturapath, *et al.*, 2017). Kemampuan akuntansi merupakan salah satu kemampuan yang mendorong penerapan akuntansi dan sistem pengumpulan informasi yang akurat (Winarsih, 2021). Apabila akuntan kurang pengetahuan akuntansi, sulit untuk memahami laporan keuangan dan memutuskan penyusunan dan kurangnya kualitas laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan akuntansi, sehingga laporan kesalahan (Andari, *et al.*, 2022).

Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan termasuk kemampuan akuntansi yang memiliki pengaruh pada kualitas laporan yang

dapat mengendalikan dan merencanakan pada suatu entitas (Safitri & Zulkarnain, 2021). Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan kemampuan suatu individu atau organisasi ataupun sistem dalam melaksanakan kewenangan atau fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ariyanto, 2020). Penelitian dari Choirunisah (2008) dan Darmawan (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Diperlukan proses dan langkah yang harus diikuti dan dituangkan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan. Sistem akuntansi yang mengatur sistem pengendalian intern, kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh belum adanya sistem pengendalian intern yang baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Setiyawati, 2013). Sistem akuntansi keuangan daerah yang disusun dalam rangka untuk mengetahui siklus akuntansi berjalan dengan baik, karena apabila terjadi masalah pada siklus akuntansi dapat mengakibatkan kurangnya kualitas pada laporan keuangan.

Keberadaan sebuah sistem akuntansi keuangan daerah menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah salah satu penerapan akuntansi di dalam penyusunan LKPD (Ariyanto, 2020). Muda, *et al.*, (2018) mengatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan

dengan tersedianya sistem akuntansi keuangan daerah yang akan lebih memudahkan pengguna sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Yuliani dan Agustini (2016) menyebutkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, pengendalian internal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha (IAI, 2007). SPI memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan dikarenakan untuk mencapai tujuan diperlukan sistem pengendalian internal yang dapat mengontrol dan mengawasi suatu entitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indriasari & Ertambang, 2008), (Nugraha & Apriyanti, 2010) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Safitri & Dezar, 2021). Meski demikian, menurut (Kewo, 2017) kelemahan pengendalian internal terletak pada banyak hal kasus pencatatan keuangan yang belum dilakukan, tetap perencanaan dan penganggaran dan implementasi yang tidak akurat, tidak memadai kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme anggaran. Pengoptimalan SPI diharapkan pengendalian

internal semakin efektif sehingga dapat memediasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan (Syarifudin, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali hasil yang tidak konsisten terkait variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan menurut (Mustika & Fadilah, 2020). Sedangkan menurut penelitian dari Jauhari, *et al* (2021) dan Wati, *et al* (2014) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kontribusi penelitian ini menambahkan variabel kemampuan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen. Penambahan kedua variabel tersebut didasari fakta bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan (Mahaputra & Putra, 2014). Sedangkan kemampuan akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan (Winarsih, 2021).

Keterbaruan penelitian ini adalah menjadikan variabel sistem pengendalian internal sebagai intervening dan penelitian ini dilakukan tahun 2023 di Dinas Pemerintahan Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Jauhari, *et al.*, (2021) variabel sistem pengendalian internal juga secara konsisten berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan menurut hasil penelitian dari hasil penelitian dari Koto, (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu

memediasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga peneliti mencoba menjadikan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel mediasi untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kemampuan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal. Selain itu penelitian ini juga merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Koto, 2019; Jauhari, *et al.*, 2021; Syarifudin, 2014).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan akuntansi berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kemampuan akuntansi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris apakah kemampuan akuntansi berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan
2. Menguji secara empiris apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan
3. Menguji secara empiris apakah sistem pengendalian intrnal berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas laporan keuangn
4. Menguji secara empiris apakah kemampuan akuntansi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal
5. Menguji secara empiris apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal

D. Manfaat Penelitian

Terdapat tiga manfaat yang diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori agensi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemda.

2. Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman akuntansi pada bidang akuntansi keuangan terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada :

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memotivas perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan akuntansi, sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas keuangan perusahaan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah mengenai karena dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan berguna bagi publik.

c. Bagi investor

Penelitian ini dihaapkan dapat bermanfaat bagi investor untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan. Dengan mengetahui kualitas laporan keuangan

yang berkualitas berdasarkan faktor yang memengaruhinya investor akan mengetahui perusahaan yang pantas mendapatkan investasi.

d. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur dalam akuntansi keuangan khususnya pada bidang pengaruh kualitas laporan keuangan pada Pemda DIY.

e. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan.